

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Menurut BPS (2015), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu/jiwa) dan Laju Perkembangan di
(persen) Indonesia Tahun 2009-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Laju perkembangan
2009	32.530,05	-
2010	31.023,40	-0,05
2011	30.018,93	-0,03
2012	28.594,60	-0,05
2013	28.553,93	0,01
2014	27.727,78	-0,03
2015	28.513,57	0,03

Sumber : BPS, data dan informasi kemiskinan Indonesia, 2016

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia dari tabel 1.1 dari tahun 2009-2015 bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami naik turun. Jumlah kemiskinan yang masih tinggi dengan jumlah tertinggi pada tahun 2009 dengan total jumlah penduduk miskin sebesar 32.530,05 ribu jiwa, ini di sebabkan karena besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Sedangkan yang terendah pada pada tahun 2014 yaitu sebesar 27.717,78 ribu jiwa dan pengurangan jumlah penduduk miskin yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan jumlah pengurangan penduduk miskin sebesar 2.433,27 ribu jiwa atau 0,07 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang,

pendidikan, dan kesehatan). Meningkatnya peranan GKM terhadap GK ini sebagian besar akibat naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok yang juga digambarkan oleh inflasi, naiknya harga barang-barang pokok makanan dan non makanan seperti listrik, air dan gas, sedangkan yang terendah terjadi di tahun 2012 ke 2013 hanya sebesar 41,33 ribu jiwa ini disebabkan menurunnya harga barang-barang pokok kebutuhan makanan. Kondisi kemiskinan di Indonesia mengalami naik turun jumlah penduduk miskin walaupun sebagian besar data yang ada mengalami penurunan (BPS, 2016).

Kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material maupun non material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan-kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimannya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sikap dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Kemudian ketidakadilan sosial ekonomi, selain oleh beragam alasan juga disebabkan oleh praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sehat. Berikut adalah gambaran umum penduduk miskin di Pulau Sumatera Tahun 2005, 2010 dan 2015 :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah di Pulau
Sumatra Tahun 2005, 2010 dan 2015 (ribu jiwa)

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin(000)		
	2005	2010	2015
Aceh	1.166,40	861,9	851,59
Sumatera Utara	1.840,20	1.490,90	1.508,14
Sumatera Barat	482,80	430	349,53
Riau	600,12	500,3	562,92
Jambi	318,05	241,6	300,71
Sumatera Selatan	1.429,32	1.125,70	1.145,63
Bengkulu	361,2	324,9	322,8
Lampung	1.572,60	1.479,93	1.100,68
Kep. Bangka Belitung	95,02	67,8	78,62
Kep. Riau	148,03	129,7	114 834

Sumber : Data Kemiskinan BPS Indonesia 2016

Dapat dilihat dari tabel 1.2 jumlah penduduk miskin di pulau Sumatera tahun 2005, 2010 dan 2015 berada di provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk miskin 1.508,59 ribu jiwa, dibawahnya ada Provinsi Sumatera Selatan dengan total penduduk miskin 1.145,63 ribu jiwa di tahun 2015 di urutan kedua dan Lampung dengan total penduduk miskin sebesar 1.100.68 ribu jiwa di 2015 di urutan ketiga.

Kondisi kemiskinan di provinsi Lampung tidak jauh berbeda dengan provinsi lain yang ada di Sumatera ataupun pulau Jawa dan bagian pulau lain yang ada di Indonesia.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas pemerintah provinsi Lampung dengan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program penanggulangan kemiskinan, mempercepat pembangunan, memperdayakan masyarakat serta penguatan pemerintah desa (Bappeda Lampung, 2014). Dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin di Lampung Tahun 2009-2015 (jiwa)

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung Barat	79.950	71.800	67.880	65.230	60.810	60.270	42.200
Tanggamus	174.930	98.100	92.750	89.360	85.640	85.020	81.600
Lampung Selatan	222.530	188.000	177.740	171.410	162.970	161.790	157.700
Lampung Timur	206.280	200.400	189.460	182.210	172.210	170.730	170.100
Lampung Tengah	230.660	197.800	187.000	180.230	162.810	161.550	164.400
Lampung Utara	171.050	164.800	155.810	149.950	142.010	140.730	140.400
Way Kanan	79.220	76.700	72.510	69.370	65.180	64.500	63.100
Tulang Bawang	86.800	43.100	40.750	38.950	33.720	36.830	44.200
Pesawaran	100.860	81.500	77.050	74.260	74.600	74.010	75.400
Bandar Lampung	123.900	128.600	121.580	117.350	102.750	102.700	100.800
Metro	21.220	20.100	19.000	18.340	17.080	16.950	16.200
Provinsi Lampung	1.497.400	1.270.900	1.201.530	1.156.660	1.079.780	1.075.080	1.056.100

Sumber : BPS, data dan informasi kemiskinan Lampung, 2016

Dapat dilihat dari tabel 1.3 daerah yang paling tinggi jumlah penduduk miskin adalah kabupaten Lampung Timur dengan jumlah 170100 jiwa pada tahun 2015 sedangkan yang terendah terdapat di kota Metro sebesar 16200 jiwa di tahun 201 dengan total semua kabupaten kota di provinsi Lampung 1056100 jiwa pada tahun 2015. Hal tersebut memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada setiap tahunnya sumbangan GKM terhadap GK sebesar 18,35 persen rata-rata pertahunnya. Dengan kata lain peningkatan Garis Kemiskinan dipicu karena kenaikan harga yang lebih tinggi pada komoditi non makanan dibandingkan komoditi makanan.

Penanggulangan kemiskinan yang komperhensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, khususnya antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Penerapan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal mengurangi jumlah penduduk miskin.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2022. memberikan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional.

Proses pembangunan ekonomi memerlukan pendapatan nasional atau pendapatan daerah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi kedepannya, PDRB adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran yang menunjukkan pendapatan regional suatu daerah apakah daerah tersebut produktif atau tidak produktif.

Kinerja perekonomian secara keseluruhan salah satunya dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut adalah rincian PDRB menurut harga konstan 2010 kabupaten kota di provinsi Lampung tahun 2009-2015 yang digambarkan pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2015

Wilayah	PDRB (juta rupiah)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung Barat	4.939	4.942	5.271	5.601	5.963	6.285	6.609
Tanggamus	6.459	6.463	6.842	7.470	7.976	8.446	8.910
Lampung Selatan	18.526	18.536	19.613	20.782	22.114	23.399	24.655
Lampung Timur	19.486	19.490	20.582	21.455	23.378	24.048	25.156
Lampung Tengah	29.097	29.114	30.867	32.702	34.816	36.793	38.773
Lampung Utara	10.176	10.181	10.729	11.334	12.066	12.764	13.457
Way Kanan	6.014	6.017	6.337	6.688	7.041	7.439	7.831
Tulang Bawang	9.819	9.772	10.284	10.828	11.559	12.198	12.810
Pesawaran	7.116	7.120	7.513	7.954	8.448	8.920	9.376
Bandar Lampung	22.396	22.410	23.819	25.404	27.156	29.033	30.867
Metro	2.540	2.542	2.696	2.876	3.074	3.262	3.453
Provinsi Lampung	136.568	136.587	144.553	153.094	163.591	172.587	181.897

Sumber : BPS Provinsi Lampung

PDRB provinsi Lampung pada Kabupaten/kota yang tertinggi di kabupaten Lampung tengah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 38.773 juta, sedangkan PDRB yang terendah yaitu pada Kota Metro dengan total PDRB sebesar Rp. 3.453 juta, hal ini disebabkan karena jumlah usaha dan perusahaan yang ada di kota Metro serta tidak adanya hasil tambang dan lainnya hanya mengandalkan sektor pertanian. Artinya PDRB pada setiap kabupaten/kota di provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Menurut hasil penelitian (Saputra dan Mudakir, 2011) memaparkan bahwa ketika keadaan ekonomi yang sedang tumbuh serta PDRB yang digamarkan sangat produktif, itu akan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan demikian bahwa PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk kategori negara

berkembang atau negara terbelakang. Selain itu indeks tersebut juga menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas rakyatnya. Dan tidak hanya menjadikan tolak ukur pengelompokan suatu negara tetapi juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur dan mengelompokan Subnegara (daerah/bagian).

IPM merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari hak dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan mendasar bagi semua lapisan masyarakat, dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran (BPS).

Kedudukan dan peran IPM dalam pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan suatu data yang lengkap. Sistem data yang lengkap dan akurat akan lebih dapat mengkaji yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk dimasukan sebagai tolak ukur pembangunan dapat mencerminkan kondisi kemiskinan masyarakat yang sesungguhnya. Adapaun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapaian prestasi IPM ini adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kasus tersebut, dan di pihak lain juga kurangnya sosialisasi tentang hal tersebut, sehingga menyebabkan buruknya prestasi kita dikancah internasional, hal ini

dapat dilihat dari masih banyaknya indikator-indikator yang belum terpenuhi (Cholili,2014).

Apa yang sudah dijelaskan di atas bahwa kualitas manusia harus di kedepankan guna perkembangan kualitas manusia itu sendiri untuk membantu mengetaskan tingkat kemiskinan yang ada. Dengan kondisi ini, bahwa IPM adalah salah satu faktor utama pembangunan manusia untuk menjadi yang berkualitas. Dengan hal tersebut berbagai daerah melakukan pembangunan di segala bidangnya, terkhusus provinsi Lampung, dapat dilihat dari data berikut tentang indek pembangunan manusia sebagai berikut:

Tabel 1.5
Indek Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
tahun 2009-2015 (dalam persen)

Wilayah	IPM (persen)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung Barat	68,83	69,28	69,72	70,17	70,37	63,54	64,54
Tanggamus	70,8	71,3	71,83	72,32	72,66	62,67	63,66
Lampung Selatan	69,5	70,1	70,53	70,95	71,25	62,75	63,66
Lampung Timur	70,2	70,7	71,26	71,64	72,14	66,42	67,1
Lampung Tengah	70,4	70,7	71,29	71,81	72,3	67,07	67,61
Lampung Utara	69,9	70,4	70,81	71,28	71,7	64,89	65,2
Way Kanan	69,5	69,9	70,43	70,84	71,08	64,32	65,18
Tulang Bawang	69,6	70,3	70,96	71,6	71,86	65,83	66,08
Pesawaran	69,4	69,8	70,3	70,9	71,25	61,7	62,7
Bandar Lampung	70,4	71,11	72,04	72,88	73,93	74,34	74,81
Metro	71	71,37	72,23	72,86	74,27	74,98	75,1
Provinsi Lampung	69,96	70,45	71,04	71,57	72,07	66,23	66,88

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung pada setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi IPM terendah yaitu di kabupaten Pesawaran dengan 62,7 persen pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena kabupaten pesawaran terkendala dalam hal pembangunan.

Tetapi secara keseluruhan IPM di Provinsi Lampung pada setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan.

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada tahun 2009-2015 mengalami peningkatan tetapi berbeda dengan tahun 2014-2015 mengalami penurunan hampir 5 persen, hal tersebut disebabkan karena perubahan indikator yang dilakukan pemerintah pusat melalui BPS untuk merubah Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) dikarenakan sudah tingginya AMH yang ada di Indonesia hingga 85 persen, maka pemerintah mengubah indikator tersebut agar terus berkembang (BPS, 2015).

IPM yang telah dijabarkan diatas bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas seseorang, dengan produktifitas seseorang akan menghasilkan sesuatu yang bernilai, guna memajukan dirinya sendiri, oleh karena itu ketika setiap orang berproduktif maka hasil pekerjaan pun akan maksimal. Dengan hal tersebut bahwa suatu daerah yang produktif maka akan meningkatkan daerah itu sendiri dari segi ekonomi untuk terus memajukan daerahnya. Daerah yang maju adalah daerah yang tingkat produktifitasnya tinggi (Todaro, 2011).

Faktor salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada

pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sukirno, 2009).

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006). Menurut Kaufman (2000), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Tabel 1.6
Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2009-2015 (Rupiah)

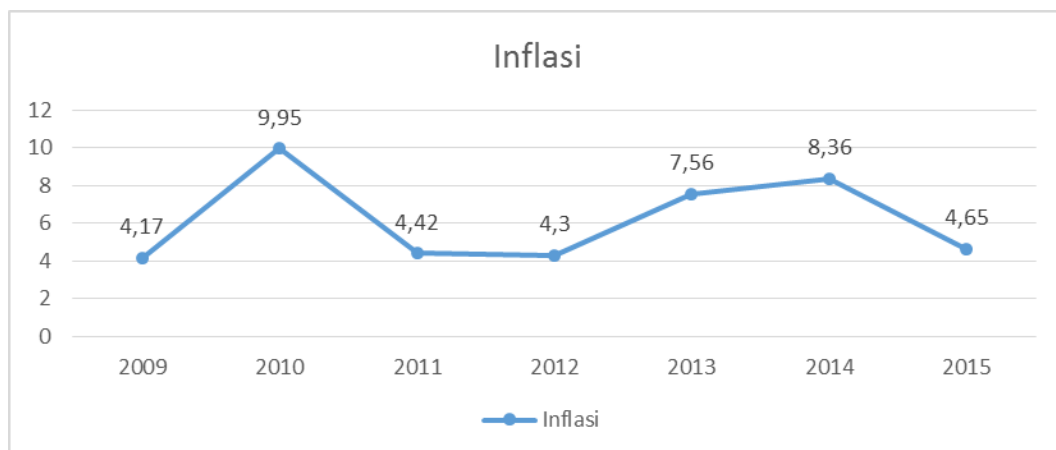
TAHUN	UMP	Laju Pertumbuhan UMP
2009	691.000	-
2010	767.500	0,11
2011	855.000	0,11
2012	975.000	0,14
2013	1.150.000	0,18
2014	1.399.000	0,22
2015	1.581.000	0,13

Sumber: Data UMP BPS Lampung, 2016

Tabel 1.6 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2009 sekitar 691.000 rupiah menjadi 1.581.000 pada tahun 2015. Sedangkan kenaikan UMP tertinggi terjadi pada tahun 2013 ke 2014 dengan kenaikan sebesar 0,22 persen atau Rp. 249.000 dan kenaikan terendah pada tahun 2010 sebesar 0,11 persen atau Rp. 76.500. Artinya pada sepuluh tahun terakhir UMP di Lampung semakin tinggi serta tingkat kebutuhan hidup yang semakin naik.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus dan dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran pendapat yang dimiliki serta dapat meningkatnya (Boediono 1982). Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Masalah inflasi adalah masalah yang terus-menerus mendapat perhatian pemerintah. Adapun yang menjadi tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku pada tingkat yang sangat rendah (Sukirno, 2009).

Grafik 1.1
Laju Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2005-2015 (persen)



Sumber: Data Inflasi Lampung, 2016

Data pada grafik 1.1 menunjukkan inflasi yang terjadi di Lampung. Inflasi tertinggi berada pada tahun 2010 dengan 9,95 persen. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi serta pengaruh terhadap perekonomian nasional kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan semua kelompok barang dan jasa, seperti: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok

pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Tinggi rendahnya inflasi begitu mempengaruhi pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh setiap masyarakat, oleh karenanya pengendalian inflasi juga harus tetap menjadi faktor penting untuk di kontrol, agar kedepannya tidak kerja kenaikan inflasi besar yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dari faktor global, nasional serta regional.

Maka dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik dan menganggap penting untuk mengkaji dan menganalisis masalah kemiskinan dengan judul **“Analisis Faktor Pengaruh PDRB, IPM, Upah Minimum Provinsi dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2015)”**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyaknya faktor yang memiliki hubungan dalam kemiskinan, maka penelitian ini hanya membahas pada:

1. Variabel-variabel yang dianggap memiliki hubungan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten kota di provinsi Lampung yaitu PDRB, IPM, UMP dan Inflasi.
2. Data yang digunakan adalah data tahun yaitu tahun 2009-2015 terdiri atas :
 - a. Jumlah Penduduk kemiskinan
 - b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

- c. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
- d. Upah Minimum Provinsi (UMP)
- e. Inflasi

C. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota provinsi Lampung
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung.
2. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung.

4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Akademis
 - a. Media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperboleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi Lampung dan Indonesia.
 - d. Menjadi masukan kepada pihak pemerintah daerah lampung dalam menangani tentang kemiskinan.
2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan persoalan PDRB, IPM, UMP dan Inflasi Terhadap Kemiskinan serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.